

BAB II
MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DAN MUTU DI MADRASAH ALIYAH

A. Manajemen Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan pembiayaan. Manajemen adalah “proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari sebuah organisasi” (Shulhan dan Soim, 2013: 6-7). Menurut Ducker manajemen adalah suatu ramalan bahwa dengan menggunakannya seorang manager pada waktu yang akan datang akan dapat mempertanggungjawabkan baik hasil maupun kualitas hubungan kemanusiaan yang berlaku di dalam organisasinya (Devies, 1996: 328).

Manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan bagi manusia, bersifat kompleks dan unik yang berbeda dengan tujuan perusahaan yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya; tujuan kegiatan pendidikan lebih mengarah kepada penciptaan kecerdasan bangsa, proses pengelolannya dilakukan secara kelompok dengan mengarahkan pada tujuan organisasi ke arah yang lebih baik dan mengedepankan sumberdaya yang ada dalam sekolah (Arikunto dan Lia, 2013: 4).

Schoderbek (1988: 8), “*Management is also tasks, activities, and*

functions. Irrespective of the labels attached to managing, the elements of planning, organizing, directing, and controlling are essential.”

Manajemen adalah juga tugas, aktivitas dan fungsi. Terlepas dari aturan yang mengikat untuk mengatur unsur-unsur pada perencanaan, pengorganisasian, tujuan, dan pengawasan adalah hal-hal yang sangat penting.

Adapun Hills (1982: 54) dalam bukunya *a dictionary of education* berpendapat tentang manajemen, yaitu *management is a difficult term to define and managers jobs are difficult to identify with precision.* Manajemen adalah istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan dan pekerjaan pemimpin yang sulit untuk diidentifikasi dengan teliti.

Sharplin (1985: 6) mendefinisikan manajemen adalah: *“management is the conducting or supervising of something (as a business); esp: the executive function of planning, organizing, directing, controlling and supervising”*.⁴³ “Manajemen adalah pelaksanaan atau pengawasan sesuatu (sebagai bisnis); seperti: fungsi eksekutif perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan”.

Menurut Sisk (t.th: 10) pada buku *Principles of Management* mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: *“Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives.* Manajemen berupa mengkoordinasikan semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif.

الإدارة هي الإصطلاح الذي يطلق التوجيه والرقابة ودفع القوى العاملة إلى العمل في المنشأة. (Muthawi, 1996: 23)

Manajemen adalah istilah yang identik dengan suatu aktivitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan, dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam organisasi.

Berikut ini dapat kita lihat mengenai manajemen dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Firman Allah SWT.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (٣٨)

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Mudassir: 38) (Depag. RI., 2003: 1087).

Selain ayat di atas juga terdapat dalam hadits Nabi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (متفق عليه)

Dari Abdillah bin Umar ra, bahwasanya: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” (Muttafaqun Alaih) (Bukhari, 1992: 173-174)

Didalam Al-Quran Allah S.W.T. berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Al-Maraghi menafsirkan, Jika mereka berselisih tentang suatu masalah, maka hal itu wajib diperiksa dalam kitab dan Sunnah dengan

kaidah-kaidah umum didalamnya. Jika sesuai dengan keduanya, maka itulah yang bermanfaat bagi kita dan kita wajib mengamalkannya. Tetapi, jika bertentangan dengan keduanya, maka hal itu tidak bermaslahat dan kita wajib meninggalkannya. Dengan demikian, selesailah perselisihan dan tercapailah kata sepakat (Bakar dan Ali, 1986: 120)

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah Saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani:

ان الله يحب اذا عمل احدكم العمل ان يتقنه (رواه امم طبراني)

Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *itqan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas) (Thabrani, t.th: 1)

Manajemen merupakan usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan; (2) manajemen merupakan sistem kerja sama; dan (3) manajemen melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, fisik dan sumber-sumber lainnya.

Khusus pada masalah pembiayaan, akhir-akhir ini pengertian pembiayaan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian itu sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin. Menurut Siagian (1989: 130) menyatakan “keuangan atau

pembiayaan yang berasal dari kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan dilakukan”.

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan (Mulyasa, 2004: 193-194).

Harta sebagai salah satu titipan Allah SWT juga harus perlu dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan pengetahuan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿النساء: ٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa: 5)

Manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa. Pembiayaan madrasah selain bersumber berasal

dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan sukarela.

2. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan

Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan, karena biaya merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam suatu kegiatan. Semua kegiatan yang memberikan *output* yang berkualitas tidak luput dari adanya ketersediaan biaya. Begitu pula dengan pendidikan, dimana pendidikan yang merupakan salah satu bentuk investasi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan biaya.

Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan menjadi bahwa manajemen pembiayaan pendidikan madrasah mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi (Mulyasa, 2002: 49).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses mempersiapkan keputusan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam organisasi (Arikunto dan Lia, 2013: 8). Menurut George R.Terry (1977 : 173), *planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired results* (perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa

yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan).

Perencanaan uang atau finansial yang disebut *budgeting* adalah kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan (Fatah, 2000: 51). Perencanaan keuangan ini dimaksudkan untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan sekolah sesuai dengan yang diharapkan (Mulyasa, 2004: 212). Perencanaan ini mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).

Ayat al Qur'an yang berkenaan dengan perencanaan adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُنْتُمْ لَهُمْ لَعْنَةً (الحشر: ١٨)

Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). (QS. al-Hasyr: 18 :) (Depag. RI., 2003: 342)

Maksud menjauhkan diri dan berbuat baik pada ayat tersebut, adalah semua tindakan atau perbuatan hendaklah difikirkan terlebih dahulu, kemudian diikhtari agar mendapat hasil sebesar-besarnya dan kerugian sekecil kecilnya, disebut perencanaan (Effendy, 1986: 77).

Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah

(RAPBM). Kedua kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan anggaran pembiayaan berbasis madrasah atau sering disebut Anggaran Belanja Madrasah (ABM) (Mulyasa, 2006: 198-199)

Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pembiayaan (Fattah, 2002: 47). Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya.

- 2) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM)

Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Pada tingkat kelompok, kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.
- b) Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus

dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM menurut keinginan seluruh warga lembaga sekolah dan mengapresiasi seluruh kebutuhan dari pihak-pihak yang terkait dalam lembaga pendidikan tersebut.

- c) Sosialisasi dan legalitas Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Baik sosialisasi kepada warga pendidikan maupun kepada instansi pendidikan yang terkait dalam hal ini Kanwil kementerian pendidikan maupun kementerian agama (Supriadi, 2003: 5-7).

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi efektif dan efisien dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.

1) Penerimaan

Penerimaan merupakan sumber dana yang dibutuhkan oleh sekolah baik dari intern sekolah seperti iuran siswa maupun bantuan dari luar seperti instansi pemerintah maupun swasta. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Penerimaan keuangan sekolah tersebut bersumber dari pemerintah, penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, uang sekolah dan sumbangan sukarela dari orang tua maupun masyarakat (Siagian, t.th.: 133).

Pola manajemen keuangan sekolah terbatas pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu kebijakan keuangan sekolah adalah adanya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Pengeluaran

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu dipergunakan secara efektif dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan

pendidikan di sekolah. Pengeluaran tersebut berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau input dari prestasi sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas-fasilitas sekolah.

Pembayaran merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat (Mulyasa, 2003: 203-204).

c. Evaluasi dan Pertanggungjawaban

1) Evaluasi

Langkah terakhir adalah evaluasi bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas sekolah. “Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan di dalam: tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai sumber daya yang tersedia” (Wahyosumidjo, 2008: 321). “*Evaluation is the result of the teacher’s concern with the goals of education*” (Lindgren, t.th: 365), yang maksudnya: evaluasi adalah hasil atau keputusan dari perhatian pendidik yang merupakan tujuan pendidikan.

Menurut Best (1981: 24) *evaluation is concerned with the*

application of its findings and implies some judgement of the effectiveness, social utility, or desirability of a product, process, or program in terms of carefully defined and agreed-upon objectives or values. Evaluasi adalah pemberian perhatian dengan cara menerapkan hasil dari temuan-temuannya yang menimbulkan beberapa penilaian dari suatu efektivitas fungsi sosial, proses, program atau hasil dalam bidang-bidang tertentu, dan didefinisikan secara hati-hati berdasarkan objek-objek atau nilai-nilai.

Menurut Williams (2000: 7) dalam buku *Management, Controlling is monitoring progress toward goal achievement and taking corrective action when progress isn't being made.* Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistik penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi di setiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi (Mulyasa, 2003: 205).

Kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar proses pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu

perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan.

3. Dasar Manajemen Pembiayaan

Dasar manajemen pembiayaan diantaranya:

a. UUD 1945

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

b. Undang-undang No 23 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
 - 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
 - 5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- 1) Tanggung jawab pendanaan pendidikan: Pasal 2 ayat (1) menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b) Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

2) Sumber Pendanaan Pendidikan Pasal 50:

- a) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- b) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- c) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- d) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

3) Pasal 51

a) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

(1) Anggaran Pemerintah;

(2) Anggaran pemerintah daerah;

(3) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

(4) sumber lain yang sah.

(5) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari Pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua /walinya; Bantuan Pemerintah; Bantuan pemerintah daerah; Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau Sumber lainnya yang sah.

4) Pengelolaan Dana Pendidikan Prinsip Pengelolaan Pasal 58 Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

a) Prinsip umum;

b) Prinsip khusus.

5) Perencanaan Pasal 64

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah harus sejalan dengan:

- a) Rencana pembangunan jangka panjang;
- b) Rencana pembangunan jangka menengah;
- c) Rencana kerja Pemerintah; dan rencana strategis pendidikan nasional.

6) Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pasal 70

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.

7) Pasal 72 Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan.

8) Pengawasan, Pemeriksaan, dan Pertanggungjawaban Pasal 76

- a) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pasal 79 Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang dan beberapa peraturan pemerintah di atas menjadi acuan dalam melaksanakan manajemen pembiayaan di setiap satuan pendidikan sehingga setiap pembiayaan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan seoptimal mungkin bagi pengembangan mutu pendidikan.

B. Biaya Pendidikan

1. Pengertian Biaya Pendidikan

Menurut Purwanto (2002:12), “Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan yang diberikan untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan.” Biaya merupakan suatu dampak yang diterima oleh seseorang atau kelompok, baik dari aspek keuangan atau sumber daya lain setelah yang bersangkutan melaksanakan kegiatan atau diberikan layanan. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di madrasah bersama komponen yang lain (Mulyasa, 2002: 47-48).

Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah menyatakan bahwa pembiayaan madrasah bersumber dari

pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara madrasah, masyarakat dan sumber dari manapun yang sah dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Pembiayaan tersebut dipergunakan sebagai biaya investasi, biaya operasi dan personal yang mengarah pada lembaga pendidikan yang berkualitas.

Menurut Simangusong biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan uang yang telah terjadi atau kelak akan terjadi, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pembiayaan dapat diartikan sebagai kegiatan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan uang telah atau kelak akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian tersebut mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Sumber ekonomi
- b. Alat ukur (berupa uang)
- c. Waktu (telah terjadi atau akan terjadi)
- d. Tujuan yang akan dicapai dengan adanya pengorbanan sumber ekonomi tersebut (Simangusong, 1992 : 1).

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang. Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Kata lainnya, hubungan antara penambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan bersifat linier.

Jadi biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan

bisa dibelanjakan untuk berbagai keperluan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam pendidikan.

2. Jenis-Jenis Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Mulyasa (2003: 48) menyimpulkan:

Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan.

Biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu ke waktu, berdasarkan pendekatan unsur biaya (*ingredient approach*), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu:

- a. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
- b. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah

- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- d. Kesejahteraan pegawai
- e. Administrasi
- f. Pembinaan teknis *educative*, dan
- g. Pendataan (Mulyasa: 2003: 49-50)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikan pasal 3 (2008: 2-4) menyebutkan:

- a. Biaya pendidikan meliputi:
 - 1) Biaya satuan pendidikan;
 - 2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - 3) Biaya pribadi peserta didik.
- b. Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - 1) Biaya investasi, yang terdiri atas:
 - a) Biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b) Biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - 2) Biaya operasi, yang terdiri atas:
 - a) Biaya personalia; dan
 - b) Biaya nonpersonalia.
 - 3) Bantuan biaya pendidikan; dan
 - 4) Beasiswa.
- c. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1) Biaya investasi, yang terdiri atas:
 - a) Biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b) Biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - 2) Biaya operasi, yang terdiri atas:
 - a) Biaya personalia; dan
 - b) Biaya nonpersonalia.
- d. Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
 - 1) Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 - a) Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - b) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - c) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 - d) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar

- guru dan dosen;
 - e) Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 - f) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 - g) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 - h) Maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
 - i) Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- 2) Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
- a) Gaji pokok;
 - b) Tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 - d) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pembiayaan juga meliputi biaya operasional yakni biaya pendidikan yang digunakan untuk menunjang kelancaran operasional pembelajaran. Pembiayaan dalam kelompok inilah yang saat ini diberikan pemerintah pusat melalui DBO (Dana Bantuan Operasional). Biaya pengembangan staf yakni pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan sekolah mencapai mutu layanan yang optimal. Termasuk pembiayaan dalam kelompok ini adalah biaya untuk membantu guru-guru mengikuti berbagai seminar dan *workshop* yang terkait langsung dengan kemampuan profesional guru, membantu guru dalam meningkatkan kualifikasi akademiknya lewat beasiswa studi ke S2 dan sejenisnya. Selanjutnya, biaya investasi yakni pembiayaan pendidikan yang diagendakan sebagai investasi masa depan sekolah. Termasuk dalam kelompok pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, laboratorium sekolah, jaringan internet untuk pembelajaran, penyediaan sarana prasarana perpustakaan dan sejenisnya yang semua itu bermakna sebagai

investasi keunggulan sekolah di masa depan.

3. Sumber Dana Pendidikan

Keuangan dan pembiayaan pada tingkat satuan pendidikan secara garis besar diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan (Supriadi, 2003: 6).

Dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu:

- a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah.
- b. Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.
- c. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF, Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan.
- d. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.

- e. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya sukarela.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 (2008: 2) menyebutkan:

- a. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - 2) Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - 3) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Jadi pendapatan madrasah selain bersumber berasal dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan sukarela.

4. Analisis Biaya Pendidikan

Biaya dalam pendidikan menuntut lembaga pendidikan formal melakukan suatu usaha pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan dengan baik. Perhitungan biaya pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya nyata (*the real cost*) sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan *aggregate*

biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan. Metode ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi (Fatah, 2000: 26-27).

Jadi dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin biasanya digunakan untuk gaji pegawai, peralatan belajar mengajar, listrik dan lain-lain. Sedangkan biaya pembangunan digunakan untuk membeli tanah atau mendirikan bangunan baru.

C. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu diartikan “sebagai tingkat baik buruknya sesuatu; kadar, derajat atau taraf; mutu” (Alwi, 2008: 768). Dengan kata lain keunggulan

yang di miliki oleh seseorang atau kelompok. Mutu adalah “kemampuan dari suatu produk atau jasa dalam memuaskan pelanggan” (Fattah, 2012: 2).

Kualitas atau mutu mula-mula digunakan oleh Plato dan Aristoteles untuk menyatakan esensi suatu benda atau hal dan merupakan atribut yang membedakannya dengan benda/hal lainnya (Hamalik, 1992: 33). Adapun dalam kamus *Webster New World Dictionary*, pengertian kualitas yaitu *The degree of excellent of a thing* (Burnalik, ed., t.th.: 488). Sedangkan Nata (2011: 15) menjelaskan pendidikan merupakan “sebuah pranata yang sangat dinamis dengan tugas utamanya menyiapkan umat manusia agar siap dan mampu menghadapi masa depannya”.

Frederick Y. Mc. Donald dalam bukunya *Educational Psychology* mengatakan: “*Education is a process or an activity which is directed at producing desirable changes into the behavior of human beings*”. (Donald, t.th.: 4). Kneller (1996: 14-15.) menyatakan bahwa *education is the process of self realization, in which the self realizes and develops all its potentialities*. Pendidikan adalah proses perwujudan diri di mana seseorang menyadari dan mengembangkan semua kemampuannya.

Pendidikan dikaitkan dengan tuntutan mutu pendidikan menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 (2013: 1) menyatakan:

Mutu pendidikan mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua segi yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Segi normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik kualitas pendidikan merupakan produk pendidikan yaitu manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sedangkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik yaitu tenaga kerja yang terlatih. Segi deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan kenyataannya semisal hasil prestasi belajar (Anwar, 2004: 50).

Menurut Nurkholis (2003: 67), menyebutkan bahwa “kualitas memiliki dua konsep yang berbeda antara konsep absolut dan relatif”. Menurut Anwar (2004: 51) konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Bila dipraktikkan dalam dunia pendidikan yang absolut ini bersifat etitis, karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang mampu menawarkan kualitas tinggi pada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya, sedangkan konsep relatif, kualitas bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur atas produk akhir dari standar yang telah ditentukan. Mutu merupakan proses terstruktur yang membantu seseorang menetapkan apakah sasaran yang diharapkan tercapai dengan memperbaiki setiap proses pendidikan.

Mutu pendidikan disebut sebagai “nilai atau suatu keadaan secara substantif. Mutu mengandung sifat dan taraf. Sifat adalah suatu yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukkan kedudukan dalam

skala” (Anwar, 2004: 51). Dalam konteksnya mutu yang dimaksud adalah dalam konsep relatif.

Kaitannya dengan pendidikan, mutu mencakup input, proses dan output pendidikan atau dengan kata lain, bila dikaitkan dengan pendidikan maka pengertian mutu akan menyangkut dengan semua aspek yang berhubungan dengan segala kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendidik yang mempunyai tiga unsur pokok yaitu masukan, proses kegiatan dan hasil yang lebih sering dikenal dengan istilah *input*, proses dan *output* (Anwar, 2004: 52)

Sebagai gambaran dari cakupan mutu yang terdiri input, proses dan output dapat dilihat sebagai berikut:

a. Input

Sekolah yang menerapkan manajemen mutu memiliki input manajemen, dimana semua staf dalam lembaga tersebut dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Tinggi rendahnya mutu input tergantung kesiapan input. Semakin tinggi kesiapan input, semakin tinggi pula mutu input. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses berjalan dengan baik. Proses bermutu tinggi bila pengoordinasian, penyesarian input harmonis sehingga mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi belajar, dan benar-benar memberdayakan siswa (Suryadi, 2012: 9-10).

Tinggi rendahnya mutu input tergantung kesiapan input.

Semakin tinggi kesiapan input, semakin tinggi pula mutu input. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses berjalan dengan baik. Proses bermutu tinggi bila pengoordinasian, penyesarian input harmonis sehingga mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi belajar, dan benar-benar memberdayakan siswa.

Memberdayakan siswa mengandung makna siswa menguasai ipteks yang diajarkan, menghayati, mengamalkan, dan mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya). Output bermutu tinggi bila sekolah menghasilkan prestasi akademik dan nonakademik siswa, dan prestasi lainnya (Baharudin, 2012: 15).

Memberdayakan siswa mengandung makna siswa menguasai iptek yang diajarkan, menghayati, mengamalkan, dan mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya). Output bermutu tinggi bila sekolah menghasilkan prestasi akademik dan non akademik siswa, dan prestasi lainnya.

b. Proses

Proses pengembangan mutu yang dilakukan sekolah perlu melibatkan perlu melibatkan segala yang terkait sekolah khususnya masyarakat dalam mendukung program sekolah, sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik (Suryadi, 2012: 11-12).

Model peningkatan mutu pendidikan meletakkan kesadaran

akan kualitas dalam lembaga pendidikan tergantung kepada faktor *intangibles*, terutama sikap manajemen tingkat atas terhadap kualitas jasa pendidikan (Rochaety, 2010: 118). Pencapaian kualitas bukan merupakan hasil penerapan cara instan jangka pendek untuk meningkatkan daya saing, melainkan melalui implementasi yang mensyaratkan kepemimpinan secara kontinu (Mulyasa, 2011: 168). Dengan demikian, kepala sekolah perlu memiliki karakteristik pribadi yang mencakup: dorongan, motivasi untuk memimpin, kejujuran integritas, kepercayaan diri, inisiatif, kreativitas, orisinalitas, fleksibilitas, kemampuan kognitif, pengetahuan bisnis, dan kharisma. Karena kualitas kepala sekolah tersebut akan dapat memberikan inspirasi kepada semua jajaran manajemen agar memperagakan kepemimpinan yang sama yang diperlukan untuk mengembangkan budaya mutu terpadu. Oleh sebab itu, keterlibatan langsung kepala sekolah sangat penting. Goetsch dan Davis dalam Mulyasa (2011: 169) mempertegas komitmen ini dengan pernyataan paling tidak sepertiga waktu kepala sekolah harus digunakan untuk terlibat langsung dalam usaha-usaha implementasi peningkatan mutu terpadu pendidikan.

Mutu di tingkat sekolah, proses meliputi pelaksanaan administrasi dalam arti proses (fungsi) dan administrasi dalam arti yang sempit. Sekolah yang efektif memiliki: a) proses belajar mengajar (PBM) yang efektivitasnya tinggi; b) kepemimpinan sekolah yang kuat; c) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; d) pengelolaan tenaga

pendidik dan kependidikan yang efektif; e) memiliki budaya mutu; f) memiliki tim kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis; g) memiliki kewenangan (kemandirian); h) partisipasi stakeholder tinggi; i) memiliki keterbukaan manajemen; j) memiliki kemauan dan kemampuan untuk berubah (psikologis dan fisik); k) melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan; n) memiliki akuntabilitas; o) sekolah memiliki sustainabilitas (keberlangsungan hidup)

c. Output yang diharapkan

Sekolah memiliki output yang diharapkan. Output adalah kinerja sekolah. Setiap warga sekolah diharapkan memiliki peran dan meningkatkan kehandalan sekolah di mata masyarakat seperti mampu menciptakan prestasi baik akademik maupun non akademik (Suryadi 2012: 12-13).

Output pendidikan adalah kinerja (prestasi) sekolah. Kinerja sekolah dihasilkan dari proses pendidikan. Output pendidikan dinyatakan tinggi jika prestasi sekolah tinggi dalam hal:

- 1) Prestasi akademik siswa berupa ulangan umum, nilai ujian nasional, seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB), lomba karya ilmiah, lomba bahasa inggris, lomba fisika, lomba matematika, dan sebagainya;
- 2) Prestasi non akademik siswa seperti imtak, kejujuran, kerjasama, rasa kasih sayang, keingintahuan, solidaritas, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, olahraga, kesopanan, olahraga, kesenian, kepramukaan,

ketrampilan, harga diri, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh tahapan kegiatan yang saling mempengaruhi (proses), yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

- 3) Proses lainnya seperti kinerja sekolah dan guru meningkat, kepuasan, kepemimpinan kepala sekolah andal, jumlah peserta didik yang berminat masuk ke sekolah meningkat, jumlah putus sekolah menurun, guru dan tenaga tata usaha yang tidak hadir berkurang, hubungan sekolah masyarakat meningkat, dan kepuasan *stakeholder* meningkat (Baharudin, 2012: 114-116).

Jadi Output madrasah pada umumnya diukur dari tingkat kinerjanya. Kinerja madrasah adalah pencapaian atau prestasi madrasah yang dihasilkan melalui proses persekolahan. Kinerja sekolah diukur dari efektifitas, produktivitas, efisiensi, dan inovasinya. Efektifitas merupakan berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Dengan kata lain, efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang (anggota) yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.

2. Pelanggan Pendidikan

a. Pengertian pelanggan pendidikan

Mutu suatu produk adalah tergantung dari tingkat kepuasan pelanggan di dalam menggunakan produk tersebut. Bila dihubungkan dengan lembaga pendidikan Islam, maka bermutu atau tidaknya lembaga pendidikan tersebut, tergantung kepada puas atau tidaknya masyarakat yang menjadi konsumen lembaga pendidikan itu. Namun sebelum membahas tentang teori-teori konsep kepuasan pelanggan, maka akan didefinisikan dahulu mengenai apa sebenarnya yang disebut dengan pelanggan.

Suryadi (2012: 26) menyatakan:

“Pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan atau suatu sekolah, maka hanya merekalah yang dapat menentukan mutunya seperti apa dan bagaimana kebutuhan mereka. pengelola, pemimpin dan warga sekolah harus bekerja sama mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan bersama”.

Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai institusi pendidikan perlu dikelola, diatur, ditata dan diberdayakan agar sekolah dapat menghasilkan produk tempat penyelenggaraan pendidikan merupakan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan serta memerlukan pemberdayaan. Secara internal sekolah memiliki

perangkat yakni guru, murid, kurikulum, sarana dan prasarana. Secara eksternal, sekolah memiliki dan berhubungan dengan instansi lain baik secara vertikal dan horisontal (Fattah, 2012: 36).

Jadi pelanggan pendidikan merupakan semua unsur yang terkait dengan pendidikan baik itu pemerintah, siswa maupun masyarakat yang merupakan unsur penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.

b. Jenis Pelanggan Pendidikan

Menurut Sallis (2006: 23), pendidikan yang termasuk pelanggan dalam (*internal customer*) adalah pegawai, pelajar, dan orang tua pelajar. Sementara pelanggan luar (*external customer*) mencakup akademi dan universitas, dan masyarakat luas. Demikian pula dengan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Hal ini penting untuk dikenali oleh pimpinan lembaga pendidikan atau kepala sekolah dan sumber daya personilnya untuk bekerja sama antara supervisor (penyedia) dan pelanggan agar menghasilkan produk yang dapat mencapai kepuasan para pelanggan pendidikan.

Sallis (2006: 88) juga menegaskan bahwa kepala sekolah harus mampu memberikan layanan terbaik bagi guru, tidak boleh menyalakan mereka sebelum dianalisis terlebih dahulu kesalahan-kesalahannya, memberi kepercayaan yang penuh pada para guru untuk mengembangkan kualitas dalam batas kewenangannya, dan harus

berusaha mengusahakan berbagai fasilitas untuk mendukung kreativitas guru.

Jadi pelanggan sekolah dapat dikategorikan ke dalam dua macam yaitu: pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal terdiri dari para guru dan karyawan, sedangkan eksternal adalah peserta didik (pelanggan primer), orang tua dan masyarakat yang membayar uang sekolah (pelanggan sekunder) dan pemakai lulusan sekolah (pelanggan tersier)

c. Kepuasan Pelanggan Pendidikan

Setiap orang yang bekerja dalam masing-masing institusi tersebut turut memberikan jasa bagi para pelanggan mereka, sehingga terjadi hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga tercipta kepuasan dari setiap pelanggan (Sallis: 2006: 67-69).

Sekolah harus mengetahui apa saja yang ditawarkan, apa kebutuhan dan keinginan siswa perhatikan pula keunggulan perguruan tinggi lainnya. Dalam hal ini bidang administrasi pendidikan sudah diperluas dan sudah memasuki bidang manajemen pemasaran.

Alma (2003: 63-65) menyatakan “Sebagai suatu lembaga penghasil jasa, madrasah harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu, dengan pimpinan yang betul-betul berkualifikasi baik”. Layanan akademik dalam konteksnya memposisikan guru selain harus profesional yang ditandai dengan penguasaan terhadap bahan ajar dengan baik, serta penguasaan berbagai strategi pembelajaran dan

teknik-teknik evaluasi, juga harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang membelajarkan siswa, dan tidak membiarkan siswa tertinggal, sehingga tidak ada siswa yang kompetensinya di bawah standar (Rosyada, 2004: 297).

Jadi kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang dimiliki seseorang pelanggan sebagai hasil perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan suatu produk atau jasa yang didapatkan.

3. Komponen Mutu Pendidikan

Adapun beberapa komponen mutu pendidikan antara lain:

a. Tujuan

Tujuan pendidikan dan pengajaran harus dipahami dan dimengerti, sebab tujuan merupakan gambaran, sasaran, dan pengarah, bagi tindakan guru untuk menjalankan fungsinya. “Tujuan pendidikan dan pengajaran membentuk manusia yang cakap, warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab, tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air” (Zuhairini, dkk., 1991: 13).

Jadi tujuan pendidikan ialah terjadinya perubahan tingkah laku sikap, dan kepribadian peserta didik setelah mengalami proses pendidikan dan pada akhirnya potensi dapat berkembang menuju manusia dewasa, potensi disini ialah potensi fisik, emosi, sosial, moral, pengetahuan, dan ketrampilan.

b. Materi

Materi merupakan “bahan yang akan disampaikan dalam kegiatan belajar-mengajar. Bahan materi pengajaran harus terintegrasi pada satu kesatuan yang bermakna dan terstruktur” (Hamalik, 2009: 36).

Bahan-bahan yang dipelajari di sekolah harus diberikan dalam suatu rangkaian yang teratur. Hal tersebut akan menambah minat dan pengertian siswa dalam mempelajari materi untuk kemudian pada taraf pendidikan yang lebih tinggi akan diberikan pengetahuan dan penghayatan yang lebih rinci.

c. Metode

Metode merupakan suatu cara berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, keterampilan, sikap peserta didik.

d. Alat

Alat merupakan sarana pengajaran berfungsi untuk membantu tercapainya suatu tujuan, menjalin komunikasi yang harmonis antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar.

e. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari integral kegiatan belajar mengajar, harus dilaksanakan secara kontinue untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi selain untuk siswa, juga untuk dirinya sendiri, agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

f. Manajemen yang efektif dan efisien

Menurut E. Mulyasa (2002: 19) manajemen pendidikan mengandung arti sebagai “suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik dan komprehensif untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

g. Buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai

h. Fisik dan penampilan sekolah yang baik

i. Partisipasi aktif masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sebuah sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sebagaimana dikemukakan oleh E Mulyasa (2002: 51) bahwa:

“Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat serta mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah”.

Partisipasi masyarakat tidak hanya membantu, melainkan menjadi partner sekolah dalam merancang kurikulum, menyediakan fasilitas dana dan fasilitas belajar, mengawasi pelaksanaan pendidikan, mengevaluasi program serta hasil pendidikan.

j. Hasil Pendidikan

Menurut Ahmad Sanusi dikutip oleh Sufyarma (2003: 209) menyimpulkan, bahwa ada empat pengertian tentang hasil pendidikan

yaitu layanan pendidikan, perolehan yang dicapai peserta didik dari berbagai kegiatannya, prestasi ekonomis-finansial yang ditampilkan dan diterima peserta didik sesudah selesai mengikuti program pendidikannya dan *out put* sosial budaya yang mampu dinikmati oleh seluruh warga sekolah. Hasil pendidikan tidak lepas dari kinerja sekolah berwujud hasil usaha atau prestasi yang dilakukan sekolah.

Konsep sekolah bermutu (unggul) perlu ada dalam konsep setiap kepala sekolah. Kepala sekolah perlu memahami falsafah, metode, teknik, dan strategi manajemen untuk perbaikan mutu sekolah. Hal ini dikarenakan kinerja organisasi sekolah senantiasa dinilai masyarakat dalam situasi yang makin maju. Kepala sekolah dan para guru perlu memahami harapan masyarakat terhadap sekolahnya.

4. Prinsip-Prinsip Mutu Pendidikan

Ada 14 butir untuk prinsip mencapai mutu pendidikan prima, diantaranya:

- a. Guru harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang menghasilkan output yang baik, customers mereka (guru, orang tua, lapangan kerja) tidak akan menyukainya.
- b. Mengadopsi filosofi baru, yang mengedepankan kualitas pembelajaran dan kualitas sekolah. Manajemen pendidikan harus mengambil prakarsa dalam gerakan peningkatan mutu ini

- c. Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menjamin bahwa input yang diterima berkualitas.
- d. Melakukan evaluasi secara kontinyu dan mencari terobosan pengembangan sistem dan proses untuk meningkatkan mutu dan produktivitas.
- e. Para guru, staf lain dan murid harus dilatih dan dilatih kembali dalam pengembangan mutu guru harus melatih siswa agar menjadi warga dan pekerja masa depan dengan mengembangkan kemampuan pengendalian diri, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.
- f. Kepemimpinan lembaga yang mengarahkan guru staf dan siswa mengerjakan tugas pekerjaannya dengan lebih baik. Di dalam mengelola kelas, guru hendaknya menerapkan visi kepemimpinan pada ke pengawasan.
- g. Menghilangkan penghalang kerjasama diantara staf, guru, dan murid atau antar ketiganya
- h. Hapus slogan, desakan atau target yang bernuansa pemaksaan dari luar.
- i. Kurangi angka-angka quota, quota dengan penerapan kepemimpinan, karena penerapan kuota justru akan mengurangi produktivitas dan kualitas.
- j. Hilangkan perintang-perintang yang dapat menghilangkan kebanggaan para guru atau siswa terhadap kecakapan kerjanya.

- k. Sejalan dengan kebutuhan penguasaan materi baru, metode-metode atau teknik-teknik baru, maka harus disediakan program pendidikan atau pengembangan diri bagi setiap orang dalam lembaga sekolah tersebut.
- l. Pengelola harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengambil bagian atau peranan dalam pencapaian kualitas (Subroto, 2004: 198-199).

Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pengemasan pelajaran dan metodologi yang digunakan oleh pengajar (guru) (Depag RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001: 41). Sebagai pengajar guru berfungsi sebagai komunikator sumber dan penyedia informasi. Bagaimana guru menyaring, mengevaluasi informasi yang tersedia dan mengolahnya ke dalam suatu bentuk yang cocok bagi kelompok penerima suatu informasi, sehingga kelompok penerima informasi dapat memahami informasi itu dalam pengetahuan tertentu yang ditransfer kepada para pelajar, sehingga membantu membawa atau mengantar mereka baik secara individu maupun kelompok kepada tingkat perkembangan kepribadian yang lebih tinggi dari apa yang dimiliki sebelumnya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُيُوتٌ مَرصُوصَةٌ
 ﴿الصف: ٤﴾

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS. Shaaf: 4) (Departemen Agama RI: 2011, 926)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿النساء: ٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa: 5)

Keberhasilan lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah atau madrasah ditandai oleh beberapa hal, antara lain; (1) lingkungan pendidikan yang aman dan tertib, (2) lembaga pendidikan memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, (3) lembaga pendidikan memiliki kepemimpinan yang kuat, (4) adanya harapan yang tinggi untuk berprestasi dari semua elemen lembaga pendidikan, (5) adanya pengembangan sumber daya manusia yang terus menerus sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan / perbaikan mutu, dan (7) adanya komunikasi dan dukungan intensif dan masyarakat.

5. Faktor-Faktor Mutu Pendidikan

Pengelolaan suatu unit pendidikan, mutu dapat dilihat dari: “masukan”, yang meliputi: siswa, tenaga pengajar, administrator, dana, sarana, prasarana, kurikulum, buku-buku perpustakaan, laboratorium, dan alat pembelajaran. “Proses”, yang meliputi: pengelolaan lembaga, pengelolaan program studi, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, interaksi akademik, seminar, penelitian, wisata ilmiah. dan “hasil”, yang

meliputi: lulusan, temuan-temuan, perilaku/akhlak, hasil-hasil, kinerja lainnya (Mastuhu, 2003: 66).

Tinggi rendahnya mutu pendidikan di madrasah dapat diukur dari ketiga faktor-faktor tersebut. Semakin tinggi input, proses, dan out-putnya, maka semakin tinggi pula mutu pendidikan madrasah tersebut. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian dan diperbaiki kualitasnya demi tercapainya mutu yang diharapkan:

a. Staf Pengajar/Guru

Guru dalam pendidikan Islam adalah fitur yang sentral yang harus dapat diteladani akhlaknya, disamping kemampuan keilmuan dan akademiknya. Selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab moral dan keagamaan, untuk membentuk anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak.

Mengenai pengertian guru, M. Muzamil Basyir, M. Malik M. Sa'id (2002: 30), mengemukakan:

المدرّس هو حجر الزاوية في العملية العامية التعليمية و عليه يتوقف مدى نجاح المنهج في تحقيق أهدافه ولهذا فإن نجاح المنهج يتوقف بنسبة كبيرة علي مدى إيمان المدرس به.

Guru adalah pokok atau sumber terpenting dari suatu kegiatan belajar mengajar yang memiliki peran dalam keberhasilan kurikulum untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu keberhasilan kurikulum tercapai karena sehubungan dengan guru itu sendiri.

Guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajaran, menurut Syeh Zarnuji (t.th: 15) dalam kitab Ta'limul muta'alim:

أَلَا تَنَالُ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ سَأُ نَبِّكَ عَنْ مَجْمُوعِهَا بَيَانٍ ذِكْرًا وَحِرْصٍ
وَاصْطِبَارٍ وَبُلْغَةٍ وَإِرْشَادٍ أَسْتَاذٍ وَطُولِ زَمَانٍ

Ingatlah, kamu tidak bisa memperoleh ilmu tanpa enam hal, akan saya terangkan dengan jelas. Harus cerdas, semangat, sabar, membawa bekal, ada petunjuk guru dan lama masa belajar.

Secara demikian, guru dalam konsep pendidikan Islam adalah sumber ilmu dan moral (Khozin, 2006: 209). Guru merupakan sentral dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu kedudukan dan peranan guru sangat penting dalam proses belajar mengajar. Seorang guru harus menempatkan diri sebagai:

- 1) Pemimpin dalam kegiatan belajar, yaitu bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengontrol kegiatan belajar mengajar.
- 2) Fasilitator dalam proses belajar, guru harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan belajarnya, misalnya: penyediaan sumber dan alat belajar.
- 3) Moderator belajar, sebagai moderator, guru berperan menampung permasalahan yang dihadapi peserta didik lainnya untuk dijawab.
- 4) Motivator dalam kegiatan belajar-mengajar, sebagai pendorong peserta didik jika peserta didik kurang bergairah/kurang aktif dalam belajar.
- 5) Evaluator dalam kegiatan belajar-mengajar, guru sebagai evaluator harus melakukan penilaian secara obyektif dan komprehensif (Subandiayah, 2002: 129-130).

Apabila peranan tersebut bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik, maka guru akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Di dalam madrasah, seorang guru agama khususnya dituntut untuk lebih mempunyai nilai plus dalam bidang agamanya. Sehingga syarat-syarat yang dimiliki harus bisa dipenuhi, guna menunjang kualitas guru agama di lingkungan pendidikan Islam.

b. Peserta Didik/Siswa

Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan (Djamarah, 2000: 51). Peserta didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sehingga anak didik juga disebut sebagai *homo educandum*. Pendidikan merupakan suatu keharusan yang diberikan kepada anak didik.

Pendidik perlu memahami peserta didik sebagai makhluk manusia, anak didik memiliki karakteristik. Peserta didik memiliki karakteristik tertentu, yakni:

- 1) Belum memiliki pribadi dewasa susila, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik (guru), atau
- 2) Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidikan.
- 3) Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, jari) latar belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh, dan lainnya), serta perbedaan individual (Djamarah, 2000: 52).

Perbedaan karakteristik dan ciri yang dimiliki oleh anak didik inilah yang membedakan anak dari anak lainnya. Perbedaan ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur perbedaan anak sebagai individu. Perbedaan inteligensi yang dimiliki oleh peserta didik merupakan aspek yang selalu aktual untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu pihak sekolah/madrasah perlu mengklasifikasikan nya ke dalam kelas-

kelas dikarenakan inteligensi adalah unsur yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar anak didik.

c. Kurikulum

Kurikulum merupakan pemandu utama bagi penyelenggara pendidikan secara formal, yang menjadi pedoman bagi setiap guru kepada sekolah/madrasah, dan pengawas pendidikan dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari (Azra, 2001: 95). Lebih dari itu kurikulum merupakan sarana untuk pencapaian dari tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kurikulum memuat jumlah mata pelajaran, dan jumlah jam belajar masing-masing mata pelajaran dalam seminggu, selama satu tahun ajaran. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah menekankan pada transfer ilmu pengetahuan dan pembentukan watak. Kurikulum madrasah memiliki dua komponen pokok, yakni komponen pendidikan umum dan komponen pendidikan Islam. Madrasah saat sekarang pada semua jenjang telah disamakan (equivalent) dengan sekolah umum.

d. Alat Pendidikan

Untuk mencapai tujuan pendidikan memerlukan berbagai alat dan metode. Istilah lain dari pendidikan yang dikenal hingga saat ini adalah media pendidikan, Audio Visual Aids (AVA) alat peraga, sarana dan prasarana pendidikan (Darajat, 1995: 80). Dengan bantuan alat pendidikan diharapkan materi-materi yang disampaikan lebih mampu diserap oleh peserta didik.

6. Ukuran Mutu Pendidikan

Mustaqim (2012: 142) Sekolah/madrasah berkualitas/unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut maka masukan (*input*), proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.

Adapun dimensi-dimensi keunggulan sebagai ciri sekolah/madrasah unggul adalah sebagai berikut:

- a. Masukan (*input*) yaitu siswa diseleksi ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah: (a) prestasi belajar superior dengan indikator angka rapor, NEM, dan hasil tes prestasi akademik; (b) skor psikotes yang meliputi intelegensi dan kreativitas; (c) tes fisik, jika diperlukan.
- b. Sarana dan prasarana menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.
- c. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata baik lingkungan fisik maupun sosio-psikologis.
- d. Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun

komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu perlu disediakan intensif tambahan bagi guru berupa uang maupun fasilitas lainnya seperti perumahan.

- e. Kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi belajar yang lebih tinggi disbanding dengan siswa seusianya.
- f. Kurun waktu belajar lebih lama dibandingkan sekolah lain. Karena itu perlu ada asrama untuk memaksimalkan pembinaan dan menampung para siswa dari berbagai lokasi. Dikompleks asrama perlu ada sarana yang bisa menyalurkan minat dan bakat siswa seperti perpustakaan, alat-alat olahraga, kesenian dan lain-lain yang diperlukan.
- g. Proses belajar mengajar harus berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) baik kepada siswa, lembaga, maupun masyarakat.
- h. Sekolah/madrasah unggul tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tersebut, tetapi harus memiliki resonansi sosial kepada lingkungan sekitarnya.
- i. Nilai sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional melalui pengembangan kurikulum, program pengayaan dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreativitas dan disiplin.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli sebagaimana dikutip oleh Umaldi (2004) dalam Mustaqim (2012: 145-150) tentang sekolah efektif/unggul antara lain dilakukan oleh:

- a. Edmonds, Brookover, Lezotte, dan Fredericksen mendeskripsikan faktor-faktor atau variable yang berkorelasi terhadap keefektifan sekolah sebagai berikut: (a) penekanan pada penguasaan anak terhadap ketrampilan dasar; (b) harapan yang tinggi terhadap anak; (c) kepemimpinan administrative yang kuat; (d) sering memonitor siswa; dan € iklim yang tertib/teratur mendukung proses belajar.
- b. Pukey dan Smith mengidentifikasi Sembilan karakteristik yang bersifat organisasi dan empat karakteristik yang bersifat proses, yaitu:
 - 1) Manajemen berbasis sekolah
 - 2) Kepemimpinan instruksional
 - 3) Kestabilan staf
 - 4) Kurikulum yang jelas dan pengorganisasian
 - 5) Pengembangan staf pada lingkup sekolah
 - 6) Keterlibatan dan dukungan orang tua
 - 7) Penghargaan/pengakuan keberhasilan akademik pada lingkup sekolah
 - 8) Memaksimalkan waktu belajar
 - 9) Dukungan kantor distrik

Empat karakteristik prosesnya adalah:

- 1) Perencanaan bersama dan hubungan yang bersahabat
- 2) Perasaan sebagai satu komunitas
- 3) Tujuan akhir yang jelas dan harapan yang tinggi
- 4) Tertib dan disiplin

c. Gauthier, Shoemaker, Villanova dan lainnya yang terlibat dalam “*The Connecticut School Effectiveness Project*” mengemukakan tujuan korelasi (karakteristik), yaitu:

- 1) keteraturan, ketertiban dan keamanan suasana lingkungan
- 2) misi sekolah yang jelas
- 3) kepemimpinan instruksional
- 4) harapan yang tinggi
- 5) kesempatan untuk belajar dan kesempatan anak untuk memanfaatkan waktu belajar
- 6) sering dilakukan monitor atas kemajuan siswa
- 7) hubungan positif antara rumah dan sekolah

d. Levine dan Lezotte memproposisikan karakteristik yang agak berbeda tentang sekolah yang tergolong efektif, meskipun sebagian besar sama, sebagai berikut:

- 1) Kultur dan iklim sekolah yang produktif
- 2) Fokus pada pencapaian ketrampilan pokok belajar siswa
- 3) Monitoring kemajuan siswa secara mandiri
- 4) Pengembangan staf yang berorientasi praktis di sekolah

- 5) Kepemimpinan yang bagus
- 6) Keterlibatan orang tua yang menonjol
- 7) Pengaturan pembelajaran dan pelaksanaannya efektif
- 8) Harapan tinggi terhadap siswa, baik secara operasional maupun persyaratan baginya
- 9) Dan seterusnya yang mungkin berkorelasi.

Selanjutnya perlu juga di tambah disini tentang tawaran untuk mengukur mutu sekolah dengan daftar uji penilaian diri dari Edward Sallis sebagai berikut:

a. Akses

- 1) Hubungan dengan pelanggan
 - a) Hubungan awal yang jelas dengan pelanggan
 - b) Penerimaan yang baik
 - c) Respon telepon yang cepat
 - d) Petunjuk dan pedoman yang siap-sedia
 - e) Survey tentang respon penunjang terhadap sambutan yang mereka terima
 - f) Tanda-tanda petunjuk yang jelas
- 2) Akses yang terbuka
 - a) Jalan landai dan lift khusus untuk para penderita tunadaksa
 - b) Bahasa awam yang digunakan dalam tanda-tanda petunjuk dan literatur

b. Layanan bagi pelanggan

- 1) Petunjuk dan bimbingan
 - a) Layanan informasi dan bimbingan yang siap-sedia
 - b) Bimbingan masuk yang tepat bagi calon pelajar
 - c) Petunjuk lanjut yang siap-sedia
 - d) Petunjuk karir yang siap-sedia
 - e) Kesejahteraan dan konseling pelajar yang mudah didapat
- 2) Sumber daya dalam proses belajar
 - a) Perpustakaan dan pusat sumberdaya yang memadai
 - b) Sumber belajar yang terbuka
 - c) Fasilitas computer yang baik
- 3) Fasilitas umum
 - a) Fasilitas kantin yang siap dan baik
 - b) Fasilitas olahraga yang memadai
 - c) Fasilitas relaksasi yang baik dan memadai
 - d) Kesempatan bagi para pelajar untuk mengorganisir aktivitasnya.

c. Kepemimpinan

- 1) Kepala sekolah
 - a) Kepala sekolah memiliki dan menyebarluaskan visi yang jelas
 - b) Kepala sekolah menjalankan tugas
 - c) Kepala sekolah mengenal para staf
 - d) Kepala sekolah mengenal para pelajar
 - e) Kepala sekolah menjalankan kepemimpinan yang baik

f) Kepala sekolah menempatkan mutu sebagai prioritas

2) Nilai-nilai

- a) Misi yang jelas dan bisa dipahami
- b) Kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama
- c) Staf dan pelajar memahami etos sekolahnya
- d) Komitmen yang kuat terhadap kebutuhan komunitas

d. Lingkungan dan sumberdaya fisik

1) Bangunan, ruang kelas dan ruang lokakarya

- a) Bersih dan atraktif
- b) Sesuai dengan tujuan
- c) Enak dipandang, nyaman dan membantu proses belajar-mengajar

2) Lingkungan belajar yang mendukung

- a) Tata latak ruang yang menarik bagi pelajar
- b) Lingkungan belajar yang terencana dan terorganisir dengan baik

3) Kesehatan dan keselamatan

- a) Pelajar terjaga dari segala bentuk kecelakaan
- b) Kebijakan kesehatan dan keselamatan yang diawasi dengan baik

4) Control dan alokasi sumberdaya

- a) Control sumberdaya yang efektif
- b) Sumberdaya terkontrol oleh yang menggunakannya

e. Pembelajaran efektif

1) Ketepatan metode pembelajaran

- a) Strategi pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan tujuan
- b) Variasi model pembelajaran yang baik dan menarik
- c) Strategi pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan respon pelajar
- d) Pembelajaran yang bersifat fokus pada pelajar
- e) Pelajar ikut bertanggungjawab terhadap proses belajar mereka sendiri
- f) Mengutamakan pembelajaran melalui skala prioritas
- g) Metode evaluasi digunakan untuk mengetahui respon pelanggan
- h) Tujuan akhir yang baik dapat diraih para pelajar

2) Ketepatan portofolio pembelajaran

- a) Ketepatan portofolio dengan kebutuhan pelajar
- b) Materi program yang relevan dan modern
- c) Respon yang cepat terhadap pengembangan program baru
- d) Evaluasi klien terhadap relevansi penawaran
- e) Penyampaian program dengan baik terhadap pemilik lapangan kerja

3) Pengawasan dan evaluasi

- a) Umpan-balik dari pelajar secara berkala
- b) Umpan-balik dari pelanggan lain secara berkala
- c) Kuesioner pelajar dan komunitas yang digunakan tepat

- d) Sistem formal institusi untuk tinjauan ulang dan evaluasi
 - e) Umpan-balik digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan
- f. Pelajar

1) Kepentingan pelajar

- a) Tanda-tanda petunjuk yang jelas
- b) Toilet yang bersih dan baik
- c) Buku panduan dan pedoman yang siap
- d) Staf sangat komunikatif dengan para pelajar
- e) Sama sekali tidak ada kendala yang dibuat-buat
- f) Layanan pelajar yang baik
- g) Transportasi yang baik
- h) Fasilitas relaksasi dan olahraga tersedia

2) Kepuasan pelajar

- a) Laporan yang baik tentang staf dan pelajar
- b) Kegembiraan dan kepuasan pelajar dibuktikan melalui survey dan kuesioner
- c) Pelajar merasa bangga terhadap tugas mereka
- d) Pelajar selalu mendapat informasi
- e) Pandangan pelajar selalu terdata

g. Staf

1) Sikap dan motivasi

- a) Berkomitmen dan berpengatahuan
- b) Berfokus pada pelajar

- c) Bertanggungjawab terhadap mutu
 - d) Merasa bangga terhadap kinerja mereka
 - e) Selalu merasa senang
 - f) Merespon kebutuhan individual
- 2) Tim kerja
- a) Berkomitmen terhadap tim dan kerja tim
 - b) Terlatih dalam keterampilan
 - c) Memiliki kemampuan kerja tim yang kuat
 - d) Memiliki ide yang jelas tentang batasan otoritas
 - e) Memiliki sumberdaya yang mendukung peningkatan mutu
 - f) Menghargai dan mendukung praktik-praktik kerja yang baik
 - g) Berkonsultasi tentang kebijakan secara teratur
- 3) Pengembangan staf
- a) Institusi berkomitmen terhadap pengembangan staf
 - b) Pengembangan staf bersifat proaktif dan secara jelas menegaskan kebutuhan institusi
 - c) Pengembangan staf memiliki tinjauan ulang tentang kebutuhan individu
 - d) Pengembangan staf mendapatkan sumberdaya yang cukup
 - e) Pengembangan staf merupakan bagian dari prioritas institusi
 - f) Pengembangan staf mencakup semua staf
 - g) Pengembangan staf untuk TQM

4) Fasilitas staf

- a) Ruang kerja yang baik
- b) Peralatan dan fasilitas yang tepat dan memadai
- c) Kesempatan untuk melakukan diskusi dan debat profesional

h. Relasi eksternal

1) Pemasaran

- a) Strategi pemasaran yang logis
- b) Riset pasar
- c) Mencari pandangan positif pra pelanggan
- d) Penyebaran kuesioner bagi para pelajar dan para pemilik lapangan kerja

2) Komunitas

- a) Hubungan baik dengan komunitas yang relevan
- b) Pandangan komunitas dimanfaatkan secara berkala
- c) Hubungan kuat dengan partner pendidikan atau partner bisnis

i. Keorganisasian

1) Perencanaan Strategis

- a) Institusi memiliki tujuan dan cita-cita yang luas
- b) Staf di semua level menyadari arah institusi
- c) Institusi memiliki perencanaan strategis yang tertulis
- d) Perencanaan mengidentifikasi cara staf agar dapat memberikan kontribusi kesuksesan

2) Kultur Organisasi

- a) Struktur yang sederhana dan ramping
- b) Otoritas didelegasikan
- c) Perubahan adalah bagian dari kultur
- d) Statemen umum tentang pengarahan
- e) Komitmen yang kuat untuk melakukan evaluasi dan tinjauan ulang
- f) Didasarkan pada kerja tim

j. Standar-standar

1) Standar keras

- a) Hasil ujian yang memuaskan dan kesuksesan pelajar
- b) Tingkat kemajuan yang tinggi
- c) Penggunaan sumberdaya-sumberdaya secara efektif
- d) Umpan-balik komunitas dan pelajar yang didasarkan pada koleksi yang sistematis
- e) Kontrol dana yang efektif

2) Standar lunak

- a) Suasana yang menyenangkan
- b) Kesejahteraan pelajar merupakan sebuah prioritas
- c) Layanan pelanggan terbukti secara nyata
- d) Lingkungan yang bersahabat
- e) Komitmen terhadap para pelajar dengan semua keahlian

3) Aplikasi standar yang benar Institusi tidak mengukur diri hanya dengan prioritas-prioritas keras semata.

Mustaqim (2012: 152) merangkum indikator-indikator sekolah/madrasah berkualitas/unggul dari pandangan beberapa ahli, yaitu:

- a. Perumusan visi, misi dan target mutu yang jelas dipahami semua pihak yang terlibat pimpinan, guru, karyawan peserta didik, orang tua dan komite sekolah/madrasah
- b. Kepemimpinan sekolah yang kuat, memperoleh dukungan dari semua pihak
- c. Memiliki motivasi dan harapan prestasi yang tinggi mampu bersaing secara terus-menerus
- d. Pengembangan dan pelatihan tenaga pendidika dan kependidikan sekolah yang terencana secara terus-menerus
- e. Evaluasi hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk penyempurnaan proses pembelajaran
- f. Komunikasi dan dukungan orang tuas dan masyarakat
- g. Komitmen dan dukungan orang tua dan masyarakat
- h. Komitmen seluruh warga sekolah akan pentingnya peningkatan mutu
- i. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib
- j. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak terkait secara terus-menerus

Indikator-indikator sekolah/madrasah bermutu dapat dijadikan rujukan karakteristik madrasah bermutu, karena penarikan kesimpulan tersebut berdasarkan pada hasil penelitian para ahli.

D. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu merupakan tantangan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan yang bermutu (Fattah, 2005: 92-93).

Hakikat mutu dalam pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh W. Deming antara lain (Arcaro, 2005: 85):

1. Menciptakan konsistensi tujuan. Menciptakan konsistensi tujuan untuk memperbaiki layanan dan siswa dimaksudkan untuk menjadikan madrasah sebagai madrasah yang kompetitif dan berkelas dunia.
2. Mengadopsi filosofi mutu total. Pendidikan berada dalam lingkungan yang benar-benar kompetitif dan hal tersebut dipandang sebagai salah satu alasan mengapa Amerika kalah dalam keunggulan kompetitifnya.
3. Mengurangi kebutuhan pengujian. Mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu.
4. Menilai bisnis sekolah dengan cara baru. Nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan. Pandanglah sekolah sebagai pemasok siswa dari kelas satu sampai kelas-kelas selanjutnya. Bekerja

bersama orang tua siswa dan berbagai lembaga untuk memperbaiki mutu siswa menjadi bagian sistem.

5. Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya.
6. Memperbaiki mutu dan produktivitas, sehingga mengurangi biaya, dengan melembagakan proses.

Sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat mencapai tujuan dan dapat memuaskan seluruh masyarakat yang memanfaatkan jasa sekolah itu dengan pembiayaan yang baik. Efektifitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi, program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu, dan amat penting menyeleksi penggunaan dan operasional, pemeliharaan dan biaya-biaya lain yang mengarah pada pemborosan (Sagala, 2008: 141), pembiayaan pendidikan perlu diarahkan kepada standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan guru yang jelas untuk mencapai mutu pendidikan. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

دع ما يريك الى ما لا يريك (رواه الترميذي و النساء)

Tinggalkanlah oleh engkau perbuatan yang meragukan, menuju perbuatan yang tidak meragukan (H.R. Tirmidzi dan Nasa'i) (Nawawi, t.th. 234).

Proses pelaksanaan manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu diantaranya:

1. Perencanaan Keuangan Madrasah
 - a. Perumusan tujuan

Perumusan tujuan yang ingin dicapai dibuat berdasarkan visi dan misi madrasah, perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya sumber daya yang secara tidak efektif. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur.

- b. Memilih program dengan memperhatikan perkiraan besarnya sumber dana yang dapat diperoleh dan sumber daya lainnya, serta sumber daya manusia yang ada.

Sebuah rencana perlu memahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan

- c. Identifikasi dan pengerahan sumber daya yang ada.
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah.

Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pertimbangkan prioritas.
- 2) Pertimbangkan kondisi awal yang telah dirumuskan melalui langkah evaluasi diri untuk mempertimbangkan prioritas yang akan ditetapkan dan sebagai langkah awal ditetapkan dan sebagai titik berangkat.
- 3) Perencanaan madrasah harus ada kaitannya dengan kemajuan mutu yang ingin dicapai pada tenggang yang bersangkutan
- 4) Penyusunan draf rencana tahunan sekolah/madrasah dibuat bersama staf pengajar lainnya
- 5) Pertimbangkan konteks lingkungan dan aspirasi masyarakat, utamanya orang tua siswa
- 6) Finalisasi (pembahasan akhir) harus melibatkan komite madrasah untuk memperoleh dukungan

Rencana anggaran yang mempunyai target dan sasaran yang jelas baik secara kuantitatif maupun kualitatif akan mampu meningkatkan mutu pendidikan.

- e. Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah
Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi

alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia, selanjutnya dikomunikasikan dengan komite madrasah dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM, selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah

Setelah perencanaan keuangan madrasah selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen adalah pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dibuat.

Pelaksanaan keuangan madrasah dapat melakukan kegiatan:

a. Penerimaan Dana Pendidikan

Pihak madrasah membentuk bendahara untuk mengelola keuangan dan membuat laporan pertanggung jawaban. Penerimaan dana madrasah bisa berasal dari iuran siswa, orang tua, sumbangan masyarakat dan bantuan pemerintah dikelola dengan baik oleh bendahara guna membiayai kegiatan madrasah.

b. Pengeluaran Dana Pendidikan

Pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan,

meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.

3. Evaluasi Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Madrasah

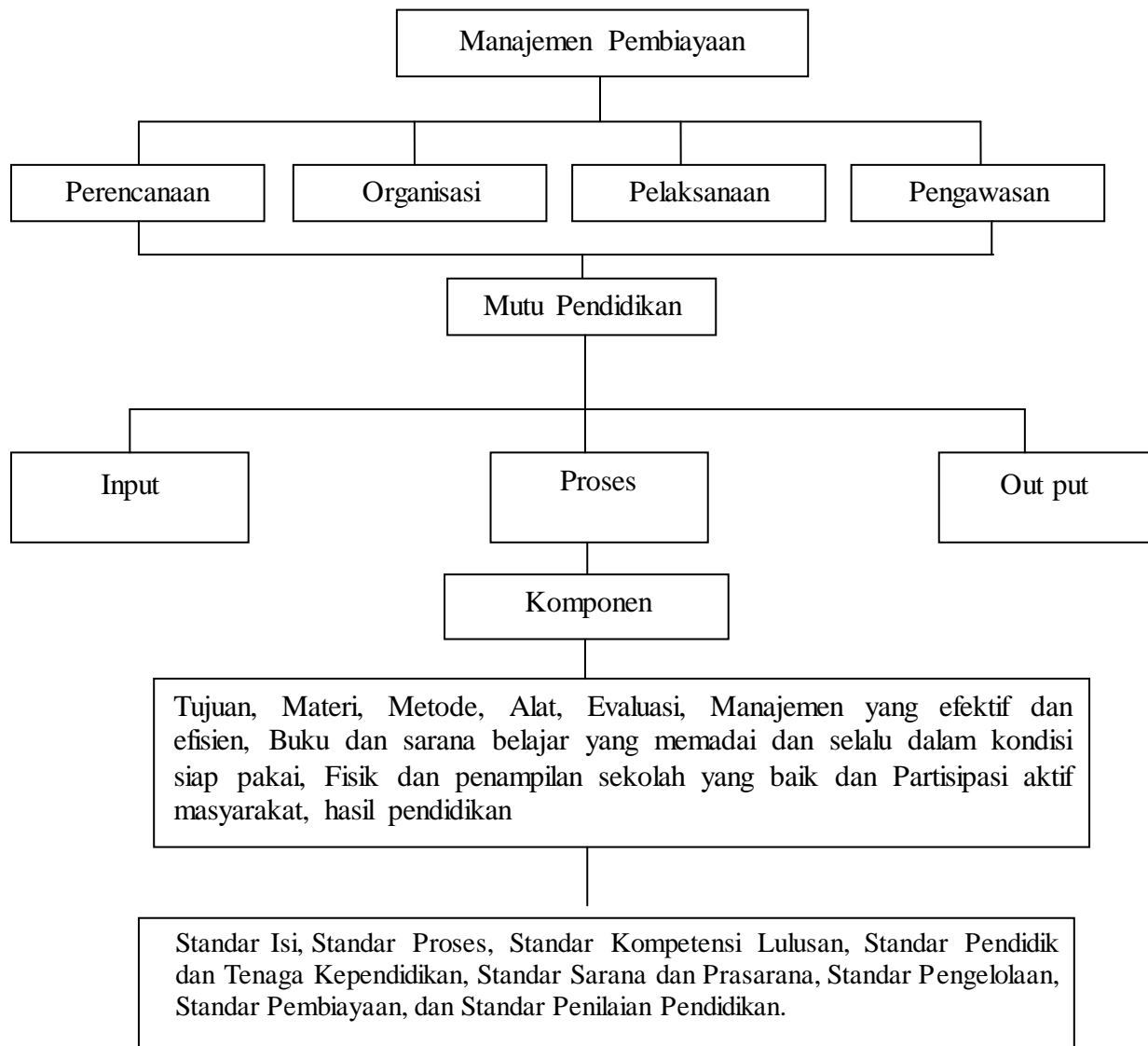
Evaluasi pembiayaan madrasah merupakan alat untuk mengukur biaya setelah perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini difungsikan sebagai langkah mengontrol perencanaan dan pelaksanaan keuangan madrasah. Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai berita acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA. Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah.

Kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar proses pelaksanaan berjalan sesuai tujuan

yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan secara sistematis sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas yang mampu memenuhi harapan semua elemen sekolah tersebut.

E. Kerangka Berfikir

Proses manajemen pembiayaan merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dapat diilustrasikan gambar sebagai berikut:



F. Kajian Pustaka

Untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan menguraikan beberapa kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardian Syah (2011) Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul *Transparansi Manajemen Keuangan Madrasah di MTs Salafiyah Mrisi Tanggunharjo Grobogan Tahun Pembelajaran 2010/2011*. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan keuangan madrasah, Madrasah Tsanawiyah Salafiah melakukannya dengan pembukuan terhadap dana yang masuk dan keluar, pembukuan ini dilakukan secara terpisah yakni dana yang masuk ditangani oleh bendahara II, sedangkan dana yang keluar dilakukan oleh bendahara I. Pembukuan yang dilakukan merupakan pembukuan yang sederhana, lengkap dan mudah dipahami sehingga menjadikan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terlaksana dengan baik. Selain pembukuan juga dilakukan pembuatan laporan terhadap dana yang masuk dan keluar yang menjadi bahan pemeriksaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan manajemen keuangan madrasah.

Penelitian Ardian Syah sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengkaji tentang pengelolaan keuangan dalam madrasah, namun penelitian Ardian syah hanya mengarah pada transparansi sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengarah pada manajemen secara komprehensif bukan hanya pada transparansi sehingga penelitian di

atas menjadi salah satu bagian pokok dalam penelitian yang peneliti lakukan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Budiyo (2007) Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul *Manajemen Biaya Pendidikan di SMP Negeri 1 Comal*. Hasil penelitian menunjukkan manajemen biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Comal meliputi proses-proses dan fungsi-fungsi penganggaran, penetapan sumber dan alokasi anggaran, dan pertanggungjawaban. Proses dan fungsi penganggaran pendidikan terkait erat dengan Rencana Pengembangan dan Rencana Tahunan SMP Negeri 1 Comal. Kedua, sumber dominan biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Comal berasal dari anggaran pemerintah. Secara garis besar, biaya itu digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja modal, belanja perjalanan, subsidi dan bantuan. Berdasarkan kategori biaya langsung dan biaya penunjang, selama tiga tahun pelajaran SMP Negeri 1 Comal menelan biaya langsung rata-rata lebih dari 90%; dan biaya penunjang sekitar 5%-7%. Berdasarkan kategori *recurrent cost* dan *capital cost*, berproporsi 59%:41% (2004/2005); 79%:21% (2005/2006); dan 83: 7% (tahun 2006/2007). *Ketiga*, pemeriksaan dan pertanggungjawaban dititikberatkan pada aliran dana sekolah. Aliran yang dimaksud mencakup pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Keempat, manajemen biaya pendidikan memberikan manfaat yang cukup berarti bagi peningkatan

kinerja SMP Negeri 1 Comal. Dengan manajemen biaya tersebut, SMP Negeri 1 Comal dapat meningkatkan bidang-bidang: (1) sumberdaya manusia yaitu peningkatan profesionalisme, pembinaan karir, kesejahteraan, dan motivasi berprestasi guru; (2) pengelolaan kesiswaan khususnya perencanaan daya tampung dan pembinaan kesiswaan; (3) pengelolaan kurikulum; (4) pembinaan kegiatan belajar mengajar dan layanan supervisi; (5) pengendalian kinerja dan penilaian prestasi kerja. Untuk menjamin keterarahan dan akuntabilitas biaya program-program pendidikan di SMP Negeri 1 Comal, penulis menyampaikan saran-saran agar manajemen biaya pendidikan di sekolah tersebut diikuti oleh: (1) Pemeliharaan komitmen pemimpin dan seluruh warga sekolah, yaitu kesediaan dan konsistensi untuk senantiasa memelihara sekolah yang sehat dan efektif; (2) Pemahaman yang memadai terhadap visi sekolah sebagai penuntun pencapaian tujuan akhir organisasi; (3) Kesediaan mengembangkan diri dalam kerangka organisasi pembelajar.

Penelitian Budiyo sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengkaji tentang manajemen pembiayaan, namun bentuk lembaga pendidikan yang diteliti Budiyo adalah lembaga negeri dan pada tingkat pendidikan sekolah tingkat pertama berbeda dengan penelitian peneliti yang mengarah pada lembaga pendidikan swasta yang berbasis Islam pada tingkat lanjutan atas yang tentunya pola manajemen dan sasaran manajemennya pembiayaan pendidikannya pun berbeda